

LOKASI SPPG SUDAH DITETAPKAN, ANAK – ANAK INHIL AKAN RASAKAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS



Sumber gambar: <https://www.rri.co.id/pekanbaru/makan-bergizi-gratis/1307875/koramil-06-kateman-kodim-03-14-inhil-luncurkan-program-mbg>

TRIBUNPEKANBARU.COM, TEMBILAHAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) telah menetapkan lokasi lahan yang akan dijadikan tempat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berdasarkan intruksi pemerintah pusat.

Meskipun belum bebrkan dimana lokasi persisnya, langkah ini menunjukkan dukungan penuh terhadap program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Asisten sekaligus Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Inhil, Budi berharap pembangunan SPPG di Inhil bisa segera memasuki tahap konstruksi dan operasional dengan kesiapan lahan ini.

“Lokasi lahan untuk pembangunan SPPG sudah kita tetapkan. Ini bentuk komitmen Pemkab Inhil mendukung penuh program nasional demi generasi sehat dan bebas stunting,” ujar Budi mewakili Bupati Inhil, Rabu (21/5/2025). Budi menjelaskan,

pembangunan SPPG ini merupakan bagian dari target nasional pembangunan 5.000 unit SPPG pada Tahun Anggaran 2025. Total terdapat 1.542 unit dibiayai langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dan sisanya melalui kolaborasi dengan mitra serta instansi daerah.

"Setiap unit akan berfungsi memproduksi dan mendistribusikan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah, ibu hamil dan menyusui di wilayah sekitarnya," imbuh Budi. Lebih lanjut Budi menjelaskan, secara nasional saat ini BGN mencatat sebanyak 53 persen dari kebutuhan lahan yang terdata, menjadikan dukungan konkret seperti yang diberikan oleh Pemkab Inhil sangat penting dalam percepatan implementasi di lapangan.

"Semoga pembangunan SPPG di Inhil bisa segera memasuki tahap konstruksi dan operasional, guna memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat, khususnya dalam peningkatan kualitas gizi dan kesehatan anak-anak," pungkasnya.

Sumber berita:

1. <https://pekanbaru.tribunnews.com/2025/05/21/lokasi-sppg-sudah-ditetapkan-anak-anak-inhil-akan-rasakan-program-makan-bergizi-gratis>, "Lokasi SPPG Sudah ditetapkan, Anak – anak Inhil akan Rasakan Program Makan Bergizi Gratis", 21 Mei 2025; dan
2. <https://mediacenter.inhilkab.go.id/berita/pemkab-inhil-siap-dukung-program-nasional-mbg-lokasi-lahan-pembangunan-sppg-telah-ditetapkan-indragiri-hilir-21-mei-2025>, "Pemkab Inhil Siap dukung Program Nasional MBG, Lokasi Lahan Pembangunan SPPG Telah Ditetapkan Indragiri Hilir, 21 Mei 2025", 22 Mei 2025.

Catatan:

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan gizi bagi anak sekolah. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk memberdayakan UMKM dan ekonomi kerakyatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Program MBG ini dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional yang berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Perpres Nomor 83 Tahun 2024) dinyatakan bahwa Badan Gizi Nasional mempunyai tugas melaksanakan pemenuhan gizi nasional.

Program MBG resmi dimulai pada 6 Januari 2025 yang dilakukan secara bertahap hingga mencakup seluruh jenjang pendidikan. Adapun sasaran pemenuhan gizi yang

menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional (BGN) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Perpres Nomor 83 Tahun 2024 sebagai berikut:

- a. peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan kegamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren;
- b. anak usia di bawah lima tahun;
- c. ibu hamil; dan
- d. ibu menyusui.

Sebagai unit yang bertugas melaksanakan program MBG, BGN telah dilengkapi dengan unit kerja yang secara komprehensif dapat melaksanakan program MBG secara efektif dan efisien. Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN bertugas untuk menyelenggarakan perumusan, koordinasi, sinkronisasi, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola pemenuhan gizi nasional.

Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN bertugas untuk melaksanakan pemantauan dan pengawasan program MBG. Sementara, Inspektorat Utama BGN bertugas melakukan pengawasan internal. Diharapkan dengan adanya pembagian kewenangan sesuai dengan unit kerja yang ditetapkan, pelaksanaan program MBG dapat berjalan baik, tepat sasaran, serta efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran.

Sejumlah aspek penting yang menjadi bagian dari implementasi program MBG sebagai berikut:

- a. Penyediaan makanan bergizi
Berkaitan dengan distribusi makanan bergizi secara gratis ke sekolah-sekolah, posyandu, fasilitas kesehatan atau langsung ke rumah tangga sasaran. Makanan yang diberikan harus memenuhi standar gizi seimbang, mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh.
- b. Edukasi gizi
Aspek edukasi gizi memiliki maksud bagaimana program penyuluhan dan pendidikan gizi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang, pemilihan makanan yang tepat, dan cara mengolah makanan yang baik. Edukasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti seminar, pelatihan, booklet, poster, dan media sosial.

c. Pemantauan dan evaluasi

Program MBG memiliki sistem untuk memantau status gizi kelompok sasaran secara berkala, seperti pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala. Evaluasi efektivitas program juga perlu dilakukan untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

d. Kerja sama lintas sektor

Adanya kolaborasi antara BGN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dikdasmen, Kementerian Sosial, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), pemerintah daerah, serta pihak terkait lainnya untuk implementasi program yang efektif dan berkelanjutan.

e. Pemberdayaan UMKM Lokal

Pemberdayaan UMKM Lokal dalam penyediaan rantai pasok makanan bergizi untuk mendorong ekonomi lokal dan memastikan ketersediaan makanan yang segar dan berkualitas.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.